

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN ROKAN HILIR

Nasrul Al Ghifari¹ Dr. Herdi Saliyoso, SE., MA²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin
Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru Indonesia

nasrualghifari@student.uir.ac.id

Received : November 21, 2025

Accepted : 10 Desember 2025

Abstract

Reporting of activities is still low, especially in reporting of a public nature to the public such as Renja and LKJIP. Lack of transparency of activities and programs of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency to the public so that the public knows the development of Rokan Hilir Regency. Public access to obtain the necessary information is still low, such as the lack of access to find information. There are no regulations such as Perda related to services. The number of officers is still lacking, especially in the service section, which can be seen from the fairly long queues. Damaged tax service facilities and infrastructure such as the unkempt lobby. The purpose of this research is to determine the application of Good Governance Principles in the Services of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency and to determine the factors that influence the Application of Good Governance Principles in the Services of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency. The informants in this study consisted of the Head of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency, Employees of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency, Head of Revenue Division, and the community receiving services from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency. The data collection techniques used in this study were observation, interview, and document techniques. Data analysis consisted of Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. Based on the results of the study on the Implementation of Good Governance Principles in the Services of the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency, it is known that it has not been optimal. This is influenced by supporting factors such as cooperation and communication, Availability of Resources, and Technology Development, while inhibiting factors include Community Participation, Human Resources, Budget Limitations, and Legal Uncertainty.

Keywords: *Implementation, Good Governance, and Regional Revenue Agency*

Abstrak

Pelaporan aktivitas yang masih rendah khususnya dalam pelaporan bersifat publikasi ke masyarakat seperti Renja dan LKJIP. Minimnya transparansi kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui perkembangan Kabupaten Rokan Hilir. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan seperti tidak adanya akses mencari informasi. Belum ada regulasi seperti Perda terkait dengan pelayanan. Jumlah petugas yang masih kurang khususnya bagian pelayanan hingga terlihat dari antrian cukup panjang. Sarana prasarana pelayanan pajak yang rusak seperti ruang *lobby* yang tidak terawat. Tujuan penelitian mengetahui penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Kabid Penerimaan, dan Masyarakat penerima layanan oleh Badan

1047

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data dalam terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir diketahui belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh Faktor pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya, dan Pengembangan Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian Hukum.

Kata Kunci: Penerapan, *Good Governance*, Dan Badan Pendapatan Daerah

Pendahuluan

Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah akan dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja dan berkolaborasi satu sama lain. Isu *good governance* disini mengantarkan sebuah jalan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan serta melaksanakan strategi pembangunan nasional dan daerah, karena *governance* merupakan suatu sistem pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan dan telah dilakukan di berbagai sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, penyelenggaraan pendidikan dan tentunya dalam pengembangan strategi pembangunan nasional maupun daerah yang nantinya akan dibahas dalam tulisan ini. Pola pengelolaan program tersebut pada umumnya diarahkan untuk menemukan bentuk-bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat atau mungkin juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.

Menurut Edelman dalam Wibowo (2004: 5), Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintahan yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lambat, tidak profesional, serta biayanya mahal.

Prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional. RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Kepala daerah menyampaikan raperda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik yang diharapkan benar-benar menjawab tantangan dan isu strategis daerah

secara tepat sasaran dan mensejahterahkan masyarakat diwilayahnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan penyusunan perencanaan yang tepat sasaran yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan yang terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku. Hasil dokumen RPJMD ini perlu menggambarkan capaian strategis setiap tahunnya selama lima tahun dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Dengan demikian, kita akan menghasilkan sebuah perencanaan dengan amplitudo unggulan yang dicapai secara periodik dan terintegrasi, serta tidak lagi menjadi sekedar sebuah perencanaan yang datar.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11), Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan daerah merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan dan melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah.

Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut : Indikator Kinerja Nilai AKIP BAPENDA Nilai AKIP Bapenda berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BAPENDA oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 08/R/LHE/INSP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah 72,65 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB.

Fenomena terkait dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir berikut:

1. Pelaporan aktivitas yang masih rendah khususnya dalam pelaporan bersifat publikasi ke masyarakat seperti Renja dan LKJIP
2. Minimnya transparansi kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui perkembangan Kabupaten Rokan Hilir
3. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan seperti tidak adanya akses mencari informasi
4. Belum ada regulasi seperti Perda terkait dengan pelayanan
5. Jumlah petugas yang masih kurang khususnya bagian pelayanan hingga terlihat dari antrian cukup panjang
6. Sarana prasarana pelayanan pajak yang rusak seperti ruang *lobby* yang tidak terawat.

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif. Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 4) adalah proses dimana

sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Menurut Thoha dalam Banga (2018:14) bahwa kata administrasi asalnya dari kata latin: yaitu *administrare*. *Ad* sendiri berarti intensif, dan *ministrare* yang artinya memenuhi atau melayani. Jadi *administrare ad* berarti melayani atau memenuhi dengan intensif. Kalau diambil kata dari bahasa Inggris jadi *administration* bila ditelaah lagi ke bahasa Indonesia menjadi administrasi. Jauh sebelum adanya terjemahan dalam bahasa Inggris, bagi masyarakat Indonesia telah mengenal istilah *administratie* sebagai warisan jaman penjajahan Belanda.

Menurut Banga (2018:15) administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat-menyurat, mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data berupa informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

Konsep Organisasi Publik

Menurut Winardi (2003 : 15) sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran- sasaran atau tujuan – tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Handoko (2011:167) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Sedangkan definisi Manajemen Publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman mengemukakan bahwa

manajemen publik bukanlah *scientific management* meskipun sangat dipengaruhi oleh *scientific management*. Manajemen Publik bukanlah *policy analysis*, bukanlah juga administrasi publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Dalam Wibowo (2007:9) suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar.

Konsep Penerapan

Menurut Wahab (2008: 63) penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat. Nurdin Usman (2002: 80) mengatakan bahwa implementasi mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, dan proses. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Konsep Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa, 2003: 1).

Konsep *governance* bukanlah baru, konsep tersebut sama tuanya dengan peradaban manusia. Secara sederhana *governance* berarti : “proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan”. *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. *Governance* juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti : *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Selama *governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai *governance* terpusat pada pelaku (aktor) formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait. (G.H Addink, 2003: 9).

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158).

Konsep Pelayanan

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya sampara dalam bukunya berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis (Albrech dalam Sedarmayanti, 2009:243). Monir dalam Pasalong (2014:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Miftah Thoha dalam Sedarmayanti (2009:243), pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

Konsep Good Governance

Definisi *good governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik (*legal and political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Ambar Teguh Sulistiyan, 2011:22).

Pengertian Mardiasmo (2018:23) mengungkapkan bahwa *good governance* adalah Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2013: 7) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan

pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. Aturan Hukum.

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian terdiri dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Kabid Penerimaan, dan Masyarakat penerima layanan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengendalian dan Penerimaan, Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, dan Masyarakat penerima layanan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator Transparansi tentang *Good Governance* dalam Pengurusan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Tanah di Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru diketahui bahwa bahwa transparansi pengurusan surat tanah di Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal karena tidak adanya akses yang diberikan kepada masyarakat dan jika masyarakat bertanya kurang di respon dengan baik.

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pekerjaan terkait pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dalam bentuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Disisi lain masyarakat berharap ada perbaikan infrastruktur pelayanan, seperti peningkatan fasilitas loket pelayanan dan pengadaan ruang tunggu yang lebih nyaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diketahui Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

- 1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya (pendapatan);
 - (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan dalam hal penetapan target, penyelenggaraan pajak daerah dan evaluasi penerimaan;
 - (3) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - (4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;
 - (5) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan di antara satuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - (6) Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan antara lintas sektor guna penggalan potensi penerimaan;
 - (7) Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja, dan pelaporan kegiatan pendapatan daerah;
 - (8) Perumusan dan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
 - (9) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Kinerja para perangkat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menurut masyarakat bahwa kinerja perangkat Bapenda sangat baik dalam memberikan informasi pertanggung jawaban serta keterbukaan dalam pelayanan yang diberikan. Namun segi waktu sebaiknya di perbaiki lagi supaya bisa lebih cepat proses pelayanan untuk masyarakat. Sedangkan dari sosialisasi masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak tau kalau ada peraturan atau program baru.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Evaluasi Kepatuhan Wajib Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Evaluasi Kepatuhan Wajib Daerah memiliki beberapa poin penting yang harus di ketahui oleh masyarakat seperti pemungutan pajak dan retribusi, termasuk ketentuan umum, jenis pajak dan retribusi, tata cara pemungutan, hingga sanksi bagi pelanggar. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelesaikan pelayanan sesuai jadwal SOP pelayanan masih belum maksimal yang di lihat dari segi disiplin pegawai karena banyak pegawai tidak ditempat saat jam pelayanan serta dari segi waktu penyelesaiannya yang masih membutuhkan waktu lama.

Transparansi

Menurut Sedarmayanti (2013: 7) Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai.

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan transparansi pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa penyediaan informasi yang jelas diberikan Bapenda untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan adanya harapan dari masyarakat agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan yang transparan dan akurat untuk masyarakat.

Bentuk transparansi informasi program kegiatan terkait pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan Bapenda menyediakan informasi yang transparan dalam bentuk, spanduk, media sosial dan lainnya. Selain itu menurut masyarakat harus ada peningkatan dari akses informasi karena masih sulit mendapatkan informasi.

Keterbukaan

Menurut Sedarmayanti (2013: 7) Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menyediakan pengaduan masyarakat pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan bentuk menyediakan layanan pengaduan melalui website, kotak saran, nomor handphone, email dan lainnya. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dapat diandalkan dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir masih bisa diandalkan sesuai dengan SOP tapi harus ada perubahan dari kedisiplinan.

Pegawai menyampaikan informasi pelayanan secara benar kepada masyarakat bahwa Bapenda memberikan penjelasan informasi yang jelas dan mudah dimengerti dengan sangat baik. Namun ada komunikasi yang belum ada fasilitas khusus kecuali kalau kita bertanya baru bisa dijelaskan.

Aturan hukum

Menurut Sedarmayanti (2013: 7) pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Cara pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang kepastian waktu penyampaian pelayanan informasi dapat diakses secara langsung dan tidak langsung seperti papan informasi website media sosial dan lainnya. Sedangkan dari sisi kepastian waktu kadang tepat tapi kadang masih belum tepat waktu. Kesiadaan pegawai Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu masyarakat dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan selalu memberikan pelayanan yang baik dan bersedia membantu sesuai dengan prosedur pelayanan Bapenda. Selain itu Bapenda Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan pelayanan baik dan profesional yang sesuai dengan SOP.

Cara pegawai yang menumbuhkan rasa percaya para masyarakat dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menyediakan keterbukaan informasi baik dan bersedia membantu sesuai dengan prosedur pelayanan Bapenda. Selain itu menyediakan pelayanan yang maksimal dan adanya kejelasan waktu pelayanan. Cara pegawai membuat masyarakat merasa aman saat menerima pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan pelayanan baik, tempat yang nyaman dan aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelayanan sesuai SOP, keterbukaan informasi dan aturan hukum yang berlaku ya cuma masih ada beberapa oknum yang tidak maksimal.

Faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir

Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya, dan Pengembangan Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian Hukum.

1. Faktor-faktor Pendukung:

- a. Kerjasama dan Komunikasi
Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
- b. Ketersediaan Sumber Daya
Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance.
- c. Pengembangan Teknologi
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi dan akuntabilitas.

2. Faktor-faktor Penghambat

- a. Partisipasi Masyarakat
Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur pelayanan.
- b. Sumber Daya Manusia
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip good governance, serta kurangnya motivasi dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
- c. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat implementasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung good governance.
- d. Ketidakpastian Hukum
Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan dan prosedur yang berlaku dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir diketahui belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh Faktor pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya, dan Pengembangan Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media
- Banga, W. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan. Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
- G.H Addink. 2003. Principles of good governance: New developments in good governance criteria in the European Union and in the Netherlands. Utrecht University, Netherlands
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Harbani Pasolong. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep. Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BAPENDA oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 08/R/LHE/INSP/2023 tanggal 16 Agustus 2023
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Pasolong Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Evaluasi Kepatuhan Wajib Daerah

Sampara Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: Stia Lan Press.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Refika Aditama

Sedarmayanti. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. PT Refika Aditama
Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. "Inovasi, Partisipasi dan Good governance". Bandung: Yayasan. Obor Indonesia.

Wahab. 2008. Tujuan Penerapan Program. Jakarta: Bulan Bintang

Wibowo, Edi, Dkk. 2004. Memahami Good Goverment Governance Dan Good Corporate Governance. Yogyakarta : Ypapi

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.

Winardi, J. 2003. Entrepreneur Dan Entrepreneurship. Jakarta : Prenada Media.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. Jurnal Administrasi Publik, 15(1).

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. Jurnal Administrasi Publik, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. Jurnal Administrasi Publik, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru.

Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.

Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.

Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.

Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. PERSPEKTIF, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4(2), 242-248.

- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). Sisi Lain Realita, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. Sisi Lain Realita, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In International Conference

- on Human-Computer Interaction (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020*, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan

Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 304-317.

Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 7(1), 1-9. Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 120-126. Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 231-237.

Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 179-191.

Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 1-18.

TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: "Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. Jurnal Administrasi Publik, 15(1).

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan

Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.

Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.

Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.

Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogია, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

- Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".